



LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2026



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

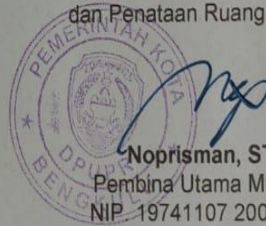
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu selama Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu untuk mendukung Pemerintah Kota Bengkulu dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kota Bengkulu.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Bengkulu, Februari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Bengkulu



Noprisman, ST. M.Si
Pembina Utama Muda – IV.c
NIP 19741107 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparat pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kineja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025- 2026, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu. Sesuai RKPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 telah dengan tujuan yaitu untuk ***“Peningkatan Pembangunan yang Merata, Inklusif dan Berkelanjutan”***; sedangkan Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur”*** untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kepala Daerah serta mewujudkan tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Bengkulu, maka mengupayakan upaya diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan fungsi pelayanan yang efektif dan efisien bidang ke PUPR-an
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang ke PUPR an berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan
3. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan jalan, jembatan, drainase, irigasi, gorong-gorong, sanitasi, air minum dan bidang ke PUPR an
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur tata bangun, prasarana dasar lingkungan dan bidang ke PUPR an yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan
5. Mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alat yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bidang ke PUPR an yang berkembang sejalan dengan peningkatan pembangunan Kota Bengkulu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 memiliki dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu ada 3 (tiga) indikator yang tidak melebihi target dan yang melebihi target sebanyak 4 (empat) indikator. Keberhasilan yang dicapai pada kinerja Tahun 2025 dengan mengutamakan pelaksanaan program bapak Walikota Bengkulu yaitu pembangunan jalan, pelaksanaan yang dilakukan sudah mencapai yang ditargetkan, tetapi memang masih ada jalan/gang pada masyarakat yang belum terakomodir pelaksanaannya yang nantinya program tersebut akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun selanjutnya.

Adapun kegagalan capaian kinerja dalam pelaksanaan tahun berjalan, pada Program Pembangunan Gedung Kantor, dikarenakan ada beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya kegagalan tersebut salah satunya pelaksanaan tender yang terlambat, pihak ketiga yang dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terlambat dan diputuskan kontrak kerjanya.

Diharapkan pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan pekerjaan hendaklah sesuai dengan *time schedule* yang telah ditetapkan, pesan Bapak Walikota Bengkulu pada masa evaluasi kemarin di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu hendaklah dalam penetapan Pihak Ketiga dalam pekerjaan dilihat dari bobot pekerjaan, kemampuan dan integritas yang tinggi dalam pekerjaan.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga sangat penting dipergunakan sebagai pijakan atau acuan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan ditahun yang akan datang.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 187.571.105.305,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 168.923.908.808,00 atau 90,06 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7
1.5 Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.1.1 Visi dan Misi	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	15
2.1.3. Strategi dan Kebijakan	18
2.1.4. Indikator Kinerja Utama	22
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	27
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	31
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.1.1. Pengukuran Kinerja	32
3.1.2. Capaian Kinerja	35
3.2. Realisasi Anggaran	49
3.3. Penyajian Data Kinerja	54
BAB IV PENUTUP	57

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Renstra Tahun 2019 - 2024
- Lampiran 2. Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR
- Lampiran 3. Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 5. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Terkait hal tersebut maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya.

Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efftciency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang.

Agar dalam pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu selama Tahun Anggaran 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu pada Tahun 2025, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir kalinya Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PelaporanAkuntabilitas Instansi Pemerintah
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, nopelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- m. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bengkulu tahun 2025 ;
- n. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.4 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2025 sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu maka ruang lingkup penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Penataan Ruang;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025, dan
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025- 2029 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.5. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis Tahun 2025- 2029 ; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3. Strategi dan Kebijakan
 - 2.1.4. Indikator Kinerja Utama

- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2024
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Pengukuran Kinerja
 - 3.1.2. Capaian Kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Penyajian Data Kinerja

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks RKPD Tahun 2025- 2029;

Lampiran 2. Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR

Lampiran 3. Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 5. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;.

2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029 adalah “ **Kota Bengkulu Semakin Maju Religius, Bahagia dan Berkelanjutan** “

Adapun misi pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029, itu terdiri atas 5 (Lima) misi

Pembangunan Daerah yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul berdaya saing berlandaskan IPTEK dan IMTAQ.
2. Mewujudkan perekonomian inklusif berbasis potensi daerah yang berdaya saing.
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang adatif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
4. Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi.
5. Meningkatkan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sesuai Isu Strategis pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024- 2026 yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sebagai berikut :**“Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”**

Visi diatas mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu “ ***Bahagia dan Religius***”.

Pembangunan yang dilaksanakan dengan berpegang pada APBD untuk rakyat sebagai mana tertuang dalam visi memberikan arti bahwa peran pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang bahagia.

Usaha-usaha perwujudan Visi Kota Bengkulu dijabarkan dalam Misi Kota Bengkulu sebagai berikut :

Misi Pejabat Walikota Bengkulu yang sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu adalah poin lima yaitu :

“Meningkatkan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”

Pembangunan Infrastruktur perkotaan diutamakan jaringan jalan, air bersih, jaringan irigasi, gedung perkantoran dan gedung layanan publik untuk semua. Peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang banyak digunakan masyarakat. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka tertuang di dalam sasaran perangkat daerah yang tertuang didalam indikator tujuan atau indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Pembangunan Infrastruktur

Tingkat konektivitas wilayah pertumbuhan/wilayah kawasan potensial, dengan indikator yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- Persentase tingkat kemantapan jalan
- Persentase bangunan gedung yang layak fungsi
- Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
- Persentase ketersediaan sanitasi yang layak
- Persentase sistem drainase yang terpenuhi

2. Meningkatkan penyelenggaraan dan penataan ruang

- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja

- Persentase administrasi umum, prasarana dan sarana penunjang perangkat daerah yang dipenuhi.
- Nilai AKIP DPUPR
- Jumlah dokumen daftar risiko (Risk Register) pada DPUPR

4. Melaksanakan inovasi daerah

- Jumlah inovasi dalam 1 tahun

Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Bengkulu yaitu ***“Peningkatan Pembangunan yang merata, inklusif dan berkelanjutan”*** sedangkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur”*** untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kepala Daerah serta mewujudkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, maka upaya yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan fungsi pelayanan yang efektif dan efisien bidang ke PUPR an
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang ke PUPR an berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan
3. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan jalan, jembatan, drainase, irigasi, gorong – gorong, sanitasi air minum dan bidang ke PUPR an
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur tata bangunan, prasarana dasar lingkungan dan bidang ke PUPR an yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bidang ke PUPR an yang berkembang sejalan dengan peningkatan pembangunan Kota Bengkulu

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

2.1.2.1 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah adalah ***“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang merata, Inklusif dan Berkelanjutan”***, sedangkan Tujuan dari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu yaitu : ***“Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana Infrastruktur”***.

2.1.2.2 Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan sasaran yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur”***.

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bisa dilihat pada tabel 2.1.2.1 dibawah ini. Sebagai kelanjutan alur logis penetapan visi dan misi serta langkah teknis pencapaiannya, maka perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang bersifat jangka menengah di Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025- 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2025	2026	2027
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	1.Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	87%	54%	53%
			2.Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	83%	7 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung
			3.Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan	90%	2 Km	3 Km

			Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi			
			4. Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak	34%	36%	38%
			5. Persentase Akses Sanitasi Layak	90%	72%	73%
			6. Persentase Sistem Drainase yang Terpenuhi	54%	4 Saluran	4 Saluran
		Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	66%	2 Dokumen	2 Dokumen
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	100%	100%	100%
			2. Nilai AKIP DPUPR	BB	BB	BB

			3. Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada DPUPR	1	1	1
		Melaksanakan Inovasi Daerah	1. Jumlah inovasi Dalam 1 Tahun	2	2	2

Sumber Data : Cascading 2025 DPUPR

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan tindak lanjut penetapan tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian visi dan Misi Pejabat Walikota Bengkulu yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, rincian atas penjelasan strategi dan kebijakan berdasarkan misi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.1
Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Pemerintah
Misi 2 (M2) : Meningkatkan Pembangunan Merata dan Berkeadilan serta Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan				
Tujuan 1 (T1) Meningkatnya Pembangunan Kota dan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	sasaran s 1. meningkatnya penerapan ekonomi hijau indikator : - persentase peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak - jumlah rekomendasi penyelenggaraa n penataan ruang	- Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, persampahan regional, air limbah dan drainase	Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Dinas PUPR
			Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Dinas PUPR
			Peningkatan layanan persampahan regional	Dinas PUPR

	- berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)		Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Dinas PUPR
			Peningkatan Kualitas sistem drainase perkotaan	Dinas PUPR
		- Meningkatkan pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungan serta penyelenggaraan jalan	- Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman	Dinas PUPR
			- Peningkatan kualitas bangunan gedung	Dinas PUPR
			- Peningkatan bangunan dan lingkungan yang tertata	Dinas PUPR

			- Peningkatan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Dinas PUPR
		Meningkatan Pengembangan Jasa Konstruksi dan Penyelenggara n Penataan Ruang	- Peningkatan kompetensi tenaga konstruksi	Dinas PUPR
			- Peningkatan kualitas penyelenggaraa n penataan ruang	Dinas PUPR
Tujuan 2 (T2) Meningkatnya Pembangunan Kota dan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran S.2 - Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Indikator : - Tingkat Kemantapan Jalan		Peningkatan Kualitas Rumah Rusak/Tidak Layak Huni	Dinas PUPR
	- Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses		Pengembangan Rumah Susun, Khusus, Swadaya	Dinas PUPR

	sanitasi layak			
	- Persentase ketersediaan akses sistem penyediaan air minum layak	Peningkatan Ketersediaan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan di Permukiman	Dinas PUPR
	Cakupan bangunan gedung dalam kondisi baik	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lingkungan	Dinas PUPR
	Jumlah rekomendasi penyelenggaraa n penataan ruang	Peningkatan Ketersediaan Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh	Pembangunan Jalan Lingkungan di Permukiman	Dinas PUPR
	Persentase cakupan	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh	Dinas PUPR
		Peningkatan Ketersedian Sanitasi Layak	Pengembangan Sanitasi Individual, Komunal dan Kawasan	Dinas PUPR
			Pengembangan Sanitasi Individual, Komunal dan	Dinas PUPR

			Kawasan di Kawasan Kumuh	
		Peningkatan Ketersedian Jaringan Drainase Lingkungan dan Kawasan	Peningkatan Ketersediaan Jaringan Drainase Lingkungan dan Kawasan	Dinas PUPR
			Peningkatan Perencanaan Induk Drainase Perkotaan	Dinas PUPR
			Peningkatan Ketersediaan Kolam Retensi/Waduk	Dinas PUPR
			Peningkatan Ketersediaan Jaringan Drainase di Kawasan Kumuh	Dinas PUPR
		Peningkatan Akses Air Bersih	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perpipaan dan Non Perpipaan	Dinas PUPR
			Pengembangan SR di Kawasan Kumuh	Dinas PUPR

	Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Gedung	Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung	Peningkatan Pengelolaan Gedung Negara	
			Peningkatan Pengelolaan Bangunan	Dinas PUPR
			Peningkatan Sistem Pengawasan Bangunan dan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
			Peningkatan Kualitas SDM Pertukangan	Dinas PUPR
		Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Daerah	Meningkatkan Kualitas Rencana Tata Ruang	Dinas PUPR
			Meningkatkan Ketersediaan Tata Ruang Dalam Pembangunan	Dinas PUPR
			Peningkatan Pelayanan Perizinan Tata Ruang	Dinas PUPR
			Peningkatan Ketersediaan RBTH Ramah Anak	Dinas PUPR

			Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan	Dinas PUPR
--	--	--	--	------------

Sumber data : RPJMD Kota Bengkulu 2025 - 2029

2.1.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja atau indikator kinerja utama harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	1. Persentase Tingkat Tingkat Kemantapan Jalan 2. Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi 3. Persentase Luas Daerah	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan Kota Kondisi Mantap}}{\text{Jumlah Total Panjang Jalan Kota}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah bangunan Gedung Kecuali Rumah Tunggal dan Rumah Deret Sederhana Yang Laik Fungsi}}{\text{Jumlah Bangunan gedung Kecuali Rumah Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana}} \times 100 \%$ Luas Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh

			Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi 4. Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak 5. Persentase Akses Sanitasi Layak 6. Persentase Sistem Drainase yang Terpenuhi	Jaringan Irigasi Yang dibangun _____ x 100 % Luar Daerah Irigasi Kewenangan Kota Jumlah Penduduk dengan Akses Terhadap Air Minum yang terlindungi dan Berkelanjutan _____ x 100 % Jumlah Penduduk Seluruhnya Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi _____ x 100 % Jumlah Rumah Tinggal Panjang Drainase Yang dikerjakan _____ x 100 % Panjang Drainase Dalam Kota
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Rerata Capaian Perencanaan Dan Pemanfaatan _____ x 100 % Target Capaian Tahun Bersangkutan
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi 2. Nilai AKIP DPUPR 3. Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada DPUPR	
		Melaksanakan Inovasi Daerah	1. Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	

Tabel 2.1.4.2
MATRIKS HUBUNGAN MISI, TUJUAN, SASARAN, IKU

Misi	Tujuan	Sasaran	IKU
➤ Misi 2 (M2) : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	❖ Tujuan 1 (T1) : 1) Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	• Sasaran 1 (T1.S1) : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur • Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Infrastruktur	Indikator : 1. Persentase Tingkat Kemantapan Jalan 2. Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi 3. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi 4. Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak 5. Persentase Akses Sanitasi Yang Layak 6. Persentase Sistem Drainase Yang Terpenuhi
	❖ Tujuan 2 (T2) : 2) Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Publik	• Sasaran 2 (T2 S2) : Meningkatkan Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Indikator 2 : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
	❖ Tujuan 3 (T3) : 3) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	• Sasaran 3 (T3 S3) : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Indikator 3 : 1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah Yang dipenuhi 2. Nilai AKIP DPUPR 3. Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) Pada DPPR
		• Sasaran 4 (T3.S4) Melaksanakan Inovasi Daerah	Indikator : 1. Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu ini dimaksudkan sebagai acuan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan program dan kegiatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu selama Tahun Anggaran 2025;

- b. Sebagai bahan acuan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu pada Tahun 2025, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu di masa yang akan datang.

TABEL 2.2.1
RENCANA KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

<i>No</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target %</i>	<i>Program dan Kegiatan</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	1. Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	87%	- Program Penyelenggaraan Jalan - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		2. Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	83%	- Program Penataan Bangunan Gedung - Kegiatan Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
		3. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh	90%	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Kegiatan Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS)

		Jaringan Irigasi		dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
		4. Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak	34%	- Pengembangan dan pengelolan saluran irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
		5. Persentase Akses Sanitasi Layak	90%	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		6. Persentase Sistem Drainase yang Terpenuhi	54%	- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota
				- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				- Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional
				- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	66%	-Program Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Ruang
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang	100%	

		Perangkat Daerah yang dipenuhi 2.Nilai AKIP DPUPR 3.Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada DPUPR	BB 1	
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	1. Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun	2	

Sumber Data : Rencana Kinerja DPUPR Tahun 2025

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TABEL 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

<i>No</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	1 Persentase Tingkat Kemantapan Jalan 2 Persentase Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi 3 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi 4 Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak 5 Persentase Akses Sanitasi Layak 6 Persentase Sistem Drainase yang Terpenuhi	87% 83% 90% 34% 90% 54%
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	66%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah Yang	100%

		Dipenuhi 2. Nilai AKIP DPUPR 3. Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada DPUPR	BB 1
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	1. Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun	2

Sumber Data : Perjanjian Kinerja DPUPR Tahun 2025

2.4. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja menyajikan target indikator yang di dalamnya sudah termasuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu. Pada perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta RKPD Tahun 2025 – 2026, yaitu terdapat perubahan misi sehingga menyebabkan adanya penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terhadap misi tersebut yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 terkait Perjanjian Kinerja, Saran dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 akan tetapi untuk target tidak mengalami perubahan yang mengalami perubahan itu di anggaran belanja per sasaran program kegiatan.

TABEL 2.4.1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	1. Persentase Tingkat Kemantapan Jalan 2. Persentase Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi 3. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi 4. Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak 5. Persentase Akses Sanitasi Layak 6. Persentase Sistem Drainase yang Terpenuhi	87% 83% 90% 34% 88% 54%
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	66%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah Yang Dipenuhi 2. Nilai AKIP DPUPR 3. Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada DPUPR	100% BB 1
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	1. Jumlah Inovasi Daerah	2

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengembalian amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja adalah merupakan sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025- 2029 ;.

Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu menyajikan tujuan, sasaran strategis, target, realisasi pada Tahun 2025 dan Tahun 2025, serta capaian.

TABEL 3.1.1.1

**PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	Realisasi		Capaian (%)
					2024	2025	
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	87%			
			Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	83%			
			Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	90%			
			Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak	34%			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	Realisasi		Capaian (%)
					2024	2025	
			Persentase Akses Sanitasi Layak	88%			
			Persentase Sistem Drainase Yang Terpenuhi	54%			
	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	66%			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah Yang Dipenuhi 2. Nilai AKIP DPUPR 3. Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada DPUPR	1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah Yang Dipenuhi 2. Nilai AKIP DPUPR 3. Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada DPUPR	100% BB 1	100% BB 1	100% BB 1	100% BB 1
	Melaksanakan Inovasi Daerah	1. Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun	1. Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun	2	2	2	2

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Perangkat DPUPR Tahun 2025

3.1.2. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 diukur dan digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025–2029.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor- faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen RKPD tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota Bengkulu merupakan uraian penjelasan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kota Bengkulu pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini :

3.1.1.1 PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur

TABEL 3.1.1.1.a
PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	87%	52,59%	87%

Sumber Data : Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Bengkulu Tahun 2025

Keterangan :

- Persentase Tingkat Kemantapan Jalan merupakan perbandingan antara Jumlah panjang jalan kota kondisi mantap dibandingkan Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota seluruhnya. Adapun capaian Tahun 2025 yaitu :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Panjang Jalan Dalam Kota Kondisi Mantap}}{\text{Jumlah Total Panjang Jalan Kota}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{665.890 \text{ M (BM)} + 5.147 \text{ M (CK PK 1 Hotmix)} + 2.049 \text{ (PLP)} + 814 \text{ M}}{1281,21 \text{ Km}} \times 100 \% \\
 &= \frac{673.900 \text{ M}}{1.281,21 \text{ Km}} \times 100 \% \\
 &= \frac{673,9 \text{ KM}}{1.281,21 \text{ Km}} \times 100 \% \\
 &= 52,59\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan SK Jalan 2013 total Panjang Jalan Kota Yaitu 942,56 Km Akan tetapi berdasarkan SK Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota (Nomor 66 Tahun 2024) Yaitu 1.054,718 KM akan tetapi di tahun 2025 total panjang jalan kota menjadi 1.281, 21 KM sehingga target kinerja sebesar 52,59% sehingga capaiannya Tidak melampaui target sebesar 87%. Adapun jalan kondisi baik (Mantap) yang dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Bidang Bina Marga tidak ada, hal tersebut di sebabkan kondisi jalan mantap untuk kota Bengkulu berdasarkan perhitungan di dalam aplikasi krisna sudah 90% sehingga untuk Kota Bengkulu pada Tahun 2025 tidak diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Tahun 2025

Tabel 3.1.1.1.b
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Persentase Jalan Kota kondisi baik	87%	62,71%	52,59%

Tabel 3.1.1.1.c

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RKPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RKPD	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 2 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	94,8%	52,59%	63,22%

Sumber Data : Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Bengkulu Tahun 2025

3.1.1.2 PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur

TABEL 3.1.1.2.a
PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	1. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	90%	0%	90%
	2. Persentase Drainase Yang Terpenuhi	54%	75,09%	54%

Sumber Data : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Bengkulu Tahun 2025

Keterangan :

- Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota Yang dilayani Oleh Jaringan Irigasi dapat dihitung dengan :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Luas Irigasi Kewenangan Kota Yang dilayani Oleh Jaringan Irigasi Yang dibangun}}{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.700 \text{ M} + 1.100 \text{ M} + 1.400 \text{ M} + 69 + 43 \text{ M} + 260 \text{ M}}{398,86 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.572 \text{ M} \times 100\%}{398,86 \text{ Ha}}$$

$$= \frac{4,572 \text{ Ha} \times 100\%}{398,86 \text{ Ha}}$$

$$= 1,146\%$$

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota yaitu 398,86 Ha terdiri atas :

1. Air Tebat Besar 333,3 Ha
2. Air Lagan 19,8 Ha
3. Air Kayu Angus 13,76 Ha
4. Air Napal 32 Ha

➤ Keterangan :

1. Persentase Sistem Drainase Yang dipenuhi dapat dihitung dengan :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Panjang Drainase Yang Dikerjakan}}{\text{Panjang Drainase Dalam Kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{20.788,73 \text{ M}'}{58.810 \text{ M}'} \times 100\%$$

$$= 0,3534 \times 100\%$$

$$= 35,34 \%$$

Tabel 3.1.1.2.b
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	90%	1,146%	0%
	Persentase Drainase Yang Terpenuhi	54%	35,34%	75,09%

Tabel 3.1.1.2.c

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RKPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RKPD	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	90%	1,146%	44%
	Persentase Drainase Yang Terpenuhi	54%	35,34%	77%

Sumber Data : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Bengkulu Tahun 2025

TABEL 3.1.1.3.a
PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Akses Air Minum	34%	0,60%	34%
	Persentase Akses Sanitasi Layak	90%	100%	90%

Sumber Data : Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Bengkulu Tahun 2025

➤ Air Minum

- Keterangan :

Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak yang dilakukan di Tahun 2025 yaitu :

1. Lokasi Pekerjaannya di seluruh Kota Bengkulu yang tertuang di dalam Kontrak di Daerah Betungan (1 Paket Pekerjaan) yaitu sebanyak 1.250 SR dan 250 SR data yang didapatkan dari PDAM jumlah penduduk terlayani per bulan September 2025 sebanyak 135.835 dan total keseluruhan SR yang ada di Kota Bengkulu yaitu 1.500 SR untuk Perjanjian Kinerja Rasio Ketersediaan Air Minum Dapat dihitung dengan :

Rumus = $\frac{\text{Jumlah Penduduk dengan Akses Terhadap Air Minum yang terlindungi dan Berkelanjutan}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruh}} \times 100\%$

$$= \frac{135.835 \text{ (Data PDAM September) } + 1.250 + 250}{394.192} \times 100\%$$

$$= \frac{137.355}{394.192} \times 100\%$$

$$= 34,83\%$$

Berdasarkan target RKPD Tahun 2025 untuk Akses Air Bersih sebesar 0,60% yang mana untuk jumlah SR yang semestinya program tersebut ada akan tetapi di alihkan untuk pekerjaannya seperti yang terurai di atas sehingga mengakibatkan capaian tidak melampaui targetnya.

➤ Persentase akses sanitasi layak

Adapun Persentase Akses Sanitasi layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal akses sanitasi berbanding jumlah rumah tinggal kali 100%. Adapun untuk kegiatan sanitasi layak yang dilaksanakan oleh bidang cipta karya untuk Tahun 2025 adalah sebanyak 2 unit yang tersebar di satu kecamatan yang terletak di Teluk Segara sebanyak 198 KK dan Kecamatan Kampung Melayu 133 KK :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100\%$$

$$= \frac{313 \text{ Unit}}{313 \text{ Unit}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Adapun Realisasi Tahun 2025 sebesar 100% (313 Unit /313 Unit x 100%) Telah Melebihi target RKPD 2024 sebesar 90%.

Tabel 3.1.1.3.b
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2025	Tahun 2025
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Akses Air Minum	34%	100%	0,60%
	Persentase Akses Sanitasi Layak	88%	100%	100%

Tabel 3.1.1.3.c
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RKPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RKPD	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Akses Air Minum	36%	0,60%	26,34%
	Persentase Akses Sanitasi Layak	90%	100%	95%

Sumber Data : Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Bengkulu Tahun 2025

3.1.1.1 Pencapaian sasaran strategis 2

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Publik

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Ruang

TABEL 3.1.1.3.b
PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	66%	83,4%	66%

Sumber Data : Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Bengkulu Tahun 2025 yang terekomendasi di dalam Aplikasi SIMBG

➤ **Keterangan :**

- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan data yang masuk kedalam Aplikasi Simbg sebanyak 6.418 Berkas yang terupload akan tetapi yang di berikan rekomendasi penerbitannya sebanyak :
 - 1.811 Berkas untuk PBG yang terekomendasi
 - 556 Berkas untuk SLF

Rumus = $\frac{\text{Rerata Capaian Perencanaan dan Pemanfaatan}}{\text{Target Capaian Tahun Berikutnya}} \times 100\%$

$$= \frac{1.811 \text{ Unit (PBG)} + 556 \text{ Unit (SLF)}}{2782 \text{ Unit}} \times 100\%$$

$$= \frac{2367 \text{ Unit}}{2782 \text{ Unit}} \times 100\%$$

$$= \frac{2367 \text{ Unit}}{2782 \text{ Unit}} \times 100\%$$

$$= 85,08\%$$

TABEL 3.1.1.3.c
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	66%	69,90%	85,08%

Sumber Data : Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Bengkulu Tahun 2025

Tabel 3.1.1.3.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RKPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RKPD	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	66%	85,08%	71,72%

3.2. Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada Tahun 2025, Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sebesar Rp. 106.493.024.743,- (***Seratus Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah***) yang tertuang di dalam DPA Nomor :DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.04.0000/002/2025 tanggal 06 Januari 2025 dan Jumlah Anggaran pada DPA Perubahan 182.650.046.146,- (***Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah***) sedangkan untuk serapan anggaran keuangan atau yang terealisasi di tahun 2025 sebesar Rp. 156.139.890.348,- (***Seratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah***) atau 87,13%.

Persentase Keuangan sebesar 87,13% atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dan beberapa pekerjaan yang batal dilaksanakan di tahun 2025.

Adapaun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel 3.2.1 tentang alokasi anggaran persasaran pembangunan adalah sebagai berikut ini :

Tabel 3.2.1
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.652.845.029,-	13.778.347.593,-	11.737.568.694,-	13.778.347.593,-
2. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	200.000.000,-	500.260.000,-	249.933.000,-	500.260.000,-
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.992.745.000,-	12.104.067.020,-	11.906.805.846,-	12.104.067.020,-
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	5.207.488.000,-	5.707.488.000,-	5.640.667.787,-	5.707.488.000,-
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.533.776.600,-	7.339.979.272,-	5.059.506.925,-	7.339.979.272,-
6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	220.000.000,-	220.000.000,-	-	220.000.000,-
7. Program Penataan Bangunan Gedung	45.115.052.114,-	81.622.336.214,-	72.094.787.346,-	81.622.336.214,-
8. Penyelenggaraan Jalan	25.821.118.000,-	58.817.739.847,-	44.367.364.000,-	58.817.739.847,-
9. Pengembangan Jasa Konstruksi	200.000.000,-	200.000.000,-	-	200.000.000,-

10. Penyelenggaraan Penataan Ruang	550.000.000,-	2.359.801.200,-	2.275.225.700,-	2.359.801.200,-
Jumlah total Anggaran	106.493.024.773,-	182.650.046.146,-	159.139.890.348,-	182.650.046.146,-

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Triwulan ke 4 DPUPR Tahun 2025.

Keterangan :

1. Relaisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 sebesar Rp 159.139.890.348,-
2. Persentase Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu yaitu 87,13%
3. Ada 2 Program kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2025 yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Tabel 3.2.2

REALISASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM	ANGGAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.778.347.593,-	11.737.568.694,-	85,19
2 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	500.260.000,-	249.933.000,-	49,96
3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.104.067.020,-	11.906.805.846,-	98,37
4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	5.707.488.000,-	5.640.667.787,-	98,83
5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7.339.979.272,-	5.059.506.925,-	68,93
6 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	220.000.000,-	-	-
7 Program Penataan Bangunan	81.622.336.214,-	72.094.787.346,-	88,33
8 Penyelenggaraan Jalan	58.817.739.847,-	44.367.364.000,-	75,43
9 Pengembangan Jasa Konstruksi	200.000.000,-	-	-
10 Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.359.801.200,-	2.275.225.700,-	96,42
Jumlah Total Anggaran Perubahan	182.650.046.146,-	159.139.890.348,-	87,13
Terbilang : Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah			

Tabel 3.2.3

**ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN
SASARAN SERTA INIKATOR KINERJA TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	1. Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	87%	75,43%	63,22%
		2. Persentase Bangunan Gedung Laik Fungsi	66%	88,33%	71,72%
		3. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota Yang dilayani Oleh Jaringan Irigasi	90%	49,96%	44%
		4. Persentase Akses Air Minum Layak	34%	98,37%	26,34%
		5. Persentase Akses Sanitasi Layak	88%	98,83%	95%
		6. Persentase Sistem Drainase Yang Terpenuhi	54%	72,25%	77%
	Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Dan Penataan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	63	96,06	71,72%

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah Yang dipenuhi	100%	85,19%	-
	2. Nilai AKIP DPUPR	BB	BB	-
	3. Jumlah Dokumen Daftar Resiko (Risk Register) pada DPUPR	1	1	-
Sasaran 4 : Melaksanakan Inovasi Daerah	1. Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun	2	2	-

3.3. Penyajian Data Kinerja

Data kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu pada Tahun 2025 menyajikan informasi target dan realisasi kinerja Tahun 2025 per sasaran. Sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur
- Indikator : 1. Persentase Tingkat Kemantapan Jalan
2. Persentase Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi
3. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi
4. Persentase ketersediaan Akses Air Minum Layak
5. Persentase Akses Sanitasi Layak
6. Persentase Sistem Drainase Yang Terpenuhi
- Sasaran 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan dan Penataan Ruang

- Indikator : 1. Persentase Kesesuaian Pemafaatan Ruang
- Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- Indikator : 1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah Yang Dipenuhi
2. Nilai AKIP DPUPR
3. Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada DPUPR
- Sasaran 4 : Melaksanakan Inovasi Daerah
- Indikator : 1. Jumlah Inovasi Dalam 1 Tahun

BAB IV

PENUTUP

Organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKJIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKJIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan uraian data capaian kinerja sasaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu disimpulkan berhasil, mengingat telah tercapainya seluruh target/sasaran yang ditetapkan dengan kategori Baik

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Mensikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan, antara lain:

1. Menindak lanjuti Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara konsekuen dengan model tender cepat (maksimal 3 hari selesai) serta persiapan lelang dilaksanakan pada Bulan Februari sehingga tanda tangan kontrak diupayakan pada Bulan Maret.
2. Perumusan sasaran dan kegiatan beserta indikator kinerjanya akan terus ditingkatkan. Penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan akan lebih diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang ada baik sumberdaya manusia, dana maupun lainnya. Meningkatkan koordinasi antar Bidang dan Unit Kerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan penggalian dan pengembangan potensi sumber daya yang dilakukan secara berlanjut, ditingkatkan dan dikembangkan.
4. Meningkatkan kemampuan dan disiplin/etos kerja Sumber Daya Manusia aparatur sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan untuk membentuk citra aparatur yang disiplin, profesional, produktif

dan berdedikasi tinggi.

5. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi baik kuantitas maupun kualiti pegawai negeri sipil (PNS)

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa sasaran – sasaran pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dikategorikan **Baik**.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu yang menggambarkan capaian kinerja tiap –tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi.

LAMPIRAN

**DOKUMENTASI PEKERJAAN
NORMALISASI DRAINASE TAMRIN MENUJU JALAN MERAWAN**

0 %



50%



100 %



**DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMELIHARAAN
REHABILITASI DRAINASE RT 44 KEL. BETUNGAN**

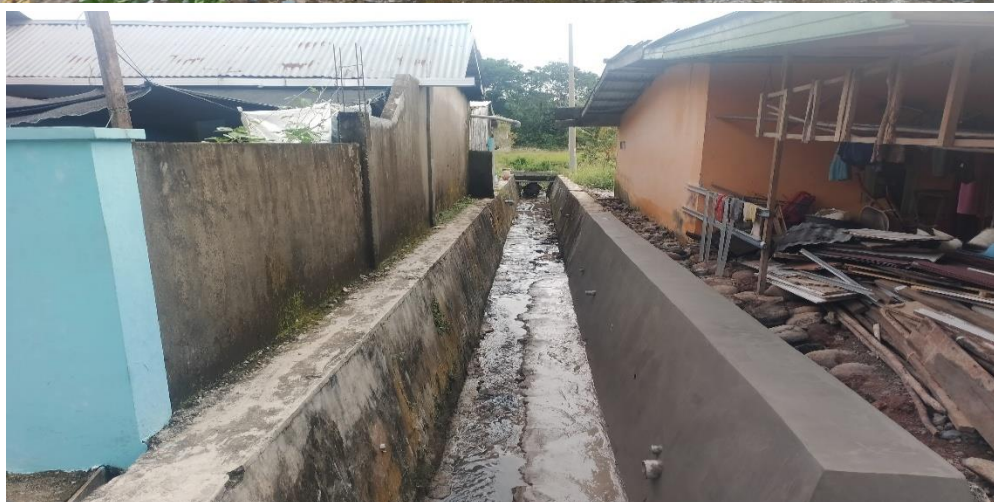
0 %



50 %



100%



PENYEDOTAN IPAL KEL.PEMATANG GUBURNUR

PEKERJAAN PENYEDOTAN IPAL KEL.BAJAK

**PEKERJAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN IPAL
PESANTEREN PANCASILA**

